

**UPAYA SWEDIA DALAM MEMPROMOSIKAN KESETARAAN  
GENDER MELALUI KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS 2014-  
2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**PAZRI RAMADAN SIREGAR**

**07041281722062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**“Upaya Swedia Dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender Melalui  
Kebijakan Luar Negeri Feminis 2014-2017”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1**

**Oleh:**

**Pazri Ramadan Siregar**

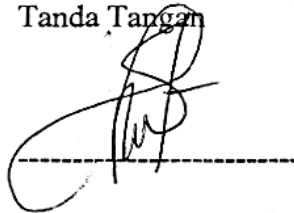
**07041281722062**

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.

NIP. 195907201985031002

Tanda Tangan



Tanggal

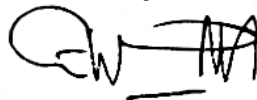
24/06

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A

NIP. 198405182018031001

Tanda Tangan



Tanggal

22/06

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



**Sofyan Efendi, S.IP., M.Si**

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“Upaya Swedia Dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender Melalui  
Kebijakan Luar Negeri Feminis 2014-2019”

Skripsi

Oleh:

Pazri Ramadan Siregar

07041281722062

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 22 Juli 2022

Pembimbing:

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 195907201985031002

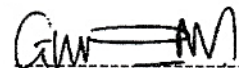
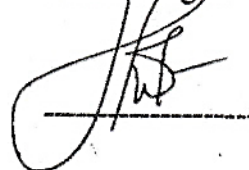
Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A  
NIP. 198405182018031001

Penguji:

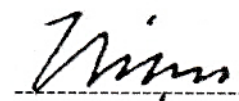
Dr. Zulfikri Suleman, MA  
NIP. 195907201985031002

Nur Aslamiah Supli BIAM., M.Sc  
NIP. 199012062019032017

Tanda Tangan

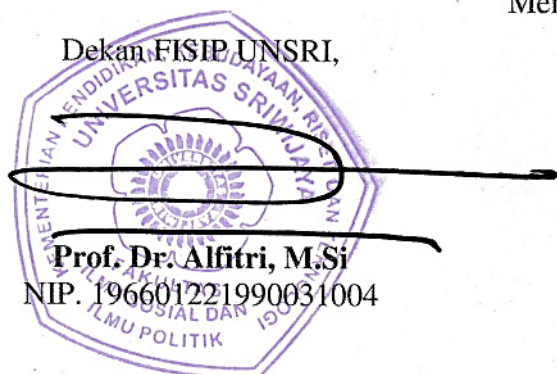


Tanda Tangan




Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan,



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pazri Ramadan Siregar

NIM : 07041281722062

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Upaya Swedia dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender Melalui Kebijakan Luar Negeri Feminis 2014-2019”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, terdapat pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 24 Juni 2022



Pazri Ramadan Siregar

07041281722062

## ABSTRAK


Swedia memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis Swedia. Swedia sebagai negara feminis pertama memiliki tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai dan ideologi feminis demi menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai upaya Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui studi pustaka yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, berita serta website dan dokumen resmi pemerintah Swedia. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep kebijakan luar negeri feminis Swedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Swedia telah secara aktif melakukan promosi terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis. Promosi yang dilakukan oleh Swedia dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti melakukan kerjasama secara bilateral, multilateral, regional dan dengan organisasi-organisasi, menjadi negara pendonor terhadap kemajuan kesetaraan gender, serta melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di segala bidang.

**Kata Kunci:** Swedia, Kesetaraan Gender, Kebijakan Luar Negeri Feminis, Feminisme

Indralaya, 22 Agustus 2022

Mengetahui,

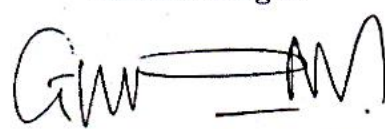
Pembimbing I



Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd

NIP. 195907201985031002

Pembimbing II



Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA

NIP. 198405182018031001

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan



Sofyan Elendi, S.IP., M.Si

NIP. 19770512200312100

## ABSTRACT

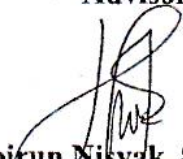
*Sweden pays attention to gender equality through its Sweden's feminist foreign policy. Sweden as the first feminist country has a goal to spread feminist values and ideology in order to create global peace and justice. This research aims to answer and provide explanation of Sweden's efforts to promote gender equality through Sweden's feminist foreign policy in 2014-2019. The research method used is qualitative-descriptive with secondary data as a source of data. The data collection technique used is through the study of relevant literature such as scientific journals, books, news and websites, and official Swedish government documents. This research is examined using the concept of Sweden's feminist foreign policy. The results showed that Sweden has been actively promoting gender equality through feminist foreign policy. This promotion is carried out with various approaches such as collaborating bilaterally, multilaterally, regionally, and with organizations, becoming a donor country for the advancement of gender equality, and conducting campaigns to increase public awareness about the importance of women's roles in all fields.*

**Keywords: Sweden, Gender Equality, Feminist Foreign Policy, Feminism**

**Indralaya, 22 August 2022**

**Acknowledge by,**

**Advisor I**

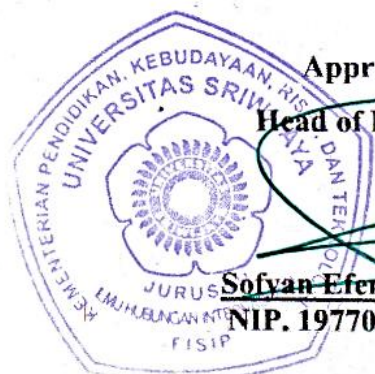
  
**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 195907201985031002**

**Advisor II**

  
**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA**  
**NIP. 198405182018031001**

**Approved by,**

**Head of Department**

  
**Sofyan Efendi, S.IP., M.Si**  
**NIP. 19770512200312100**



## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Maka dari itu, peneliti persembahkan hasil penelitian skripsi yang berjudul **“Upaya Swedia dalam Mempromosikan Kesetaraan Gender Melalui Kebijakan Luar Negeri Feminis 2014-2019”**

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak rintangan dan halangan yang telah dilalui. Penulis tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuan yang telah penulis dapatkan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta bapak Arpan Siregar dan Ibunda tercinta ibu Khairani selaku orang tua penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberi segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Kakak tersayang Sri Wahyuni Siregar dan Abang Budi Santoso yang telah memberikan dukungan terutama dukungan materil dalam membiayai biaya perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan dunia perkuliahan penulis.
3. Kakak tersayang Rahmi Nurhidayah Siregar dan Abang Fadel Ali Harahap, Abang tersayang Rahmat Parlindungan Siregar dan Kakak Seri Wahyuni Nasution, serta tidak lupa adik tersayang Riswan Asri Siregar yang selalu memberikan segala bentuk dukungan dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Bapak Sofyan Efendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. dan Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku dosen penguji I memberikan masukan untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Ibu Nur Aslamiah Supli, Biam, M.SC selaku dosen penguji II sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjalani masa kuliah di Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
9. Admin Ilmu Hubungan Internasional Indralaya, Mbak Siska dan Kak Dimas, yang telah banyak membantu urusan administrasi selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan terutama teman-teman yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan hingga akhir yaitu Haris Septa Budiansyah, Toharuddin, Nurjanah, Siti Maryam, Adella Indah, Rany Veronica, Putri Melta, Aura Agustine, Gara.
11. Keluarga IMATABAGSEL SUMSEL terutama teman-teman angkatan 2017 yang telah menjadi keluarga dekat penulis selama diperantauan.
12. Semua pihak lainnya baik teman-teman HI Angkatan 2017 dan rekan-rekan organisasi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Indralaya, 22 Juli 2022

Penulis,

Pazri Ramadan Siregar



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Objektif .....	8
1.3.2 Tujuan Subjektif .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>

2.1	Penelitian Terdahulu .....	11
2.2	Kerangka Konseptual.....	19
2.2.1	Feminist Foreign Policy (FFP) .....	19
2.3	Kerangka Pemikiran .....	23
2.4	Argumentasi Utama .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>25</b>
3.1	Desain Penelitian .....	25
3.2	Definisi Konsep .....	25
3.3	Fokus Penelitian.....	27
3.4	Unit Analisis .....	29
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7	Teknik Keabsahan Data .....	30
3.8	Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS SWEDIA .....</b>		<b>32</b>
4.1	Sejarah Feminisme di Swedia.....	33
4.2	Kesetaraan Gender Di Swedia .....	37
4.3	Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia.....	45
<b>BAB V UPAYA SWEDIA DALAM MEMPROMOSIKAN KESETARAAN GENDER MELALUI KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS SWEDIA.....</b>		<b>54</b>
5.1	Dimensi Hak-Hak .....	54

5.1.1	Asas pemenuhan terhadap HAM.....	55
5.1.2	Bebas dari tindak kekerasan fisik, mental dan kekerasan seksual.....	58
5.1.3	Hak reproduksi dan seksual yang sehat (SRHR).....	63
5.2	Dimensi Representasi .....	67
5.2.1	Partisipasi politik dan pengaruh perempuan di semua bidang masyarakat ...	67
5.2.2	Partisipasi wanita dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dalam masa sebelum dan sesudah konflik.....	73
5.3	Dimensi Sumber Daya .....	78
5.3.1	Hak ekonomi dan pemberdayaan perempuan.....	80
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>		<b>86</b>
6.1	Kesimpulan .....	86
6.2	Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	27

## DAFTAR SINGKATAN

ATT	UN Arms Trade Treaty
AU	African Union
C3E	Clean Energy Education and Empowerment
CERF	UN Central Emergency Response Fund
CFFP	Centre of Feminist Foreign Policy
CIF	World Bank Climate Investment Funds
DAC	Development Assistance Committee
DRC	Republic Democratic Congo
DFI	Development Finance Institution
EEAS	European External Action Service
EU	European Union
FBA	Folke Bernadotte Academy
FFP	Feminist Foreign Policy
Fi	Feminist initiative
FSC	Forum for Security Cooperation
GBV	Gender Based-Violence
GCF	Green Climate Fund
GEF	Global Environment Fund
HAM	Hak Asasi Manusia
ICC	International Criminal Court
IGC	International Gender Champions
IPU	Inter-Parleментар Union
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi

OCHA	UN Office of Coordination of Humanitarian Affairs
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development -
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OSCE	The Organization for Security and Co-operation in Europe
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
SIDA	Swedish International Development Cooperation Agency
SRHR	Sexual and reproductive health and rights
SWL	Swedish Women's Lobby
UE	Uni Eropa
UNFPA	United Nations Population Fund
UNICEF	UN Children's Fund
UNOCT	UN Office of Counter-Terrorism
UNSCR	United Nations Security Council
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UN	United Nations
WPS	Women, Peace and Security
WTO	World Trade Organization

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini, meskipun dunia telah memasuki era globalisasi, masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai belahan dunia. Isu perjuangan feminisme untuk hak-hak perempuan di berbagai bidang mulai berkembang ratusan tahun yang lalu, tepatnya sejak akhir abad ke-18. Namun, meski sudah berkembang sejak lama, dan muncul berbagai gerakan untuk menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, nyatanya kemajuan menuju pencapaian kesetaraan gender secara global masih sangat lambat (Reader, 2012). Bahkan Menurut World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2018, akan memakan waktu 107 tahun lagi untuk menutup kesenjangan gender di bidang politik dan butuh 202 tahun untuk mengisi mengisi kesenjangan gender di bidang ekonomi (Lofven, 2019).

Terlepas dari langkah-langkah nasional dan internasional yang substansial yang telah diambil terhadap kesetaraan gender, permasalahan ketidaksetaraan gender masih menjadi permasalahan global. Hanya empat dari 135 negara yang telah mencapai kesetaraan gender termasuk Kosta Rika, Kuba, Swedia, dan Norwegia. Yaman merupakan negara dengan tingkat kesetaraan paling rendah di semua dimensi seperti akses pada pendidikan dasar, kesehatan dan harapan hidup, kesetaraan peluang ekonomi, dan pemberdayaan politik. Meskipun terdapat kemajuan yang nyata, banyak isu yang mengkhawatirkan mengenai diskriminasi gender masih beredar dewasa ini (Kamrany & Robinson, 2012).

Isu ketidaksetaraan gender tentunya meliputi diskriminasi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang politik. Meski jumlah perempuan sudah mencapai 50% dari populasi dunia,



namun data dari Inter-Parlementer Union (IPU) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, kurang dari 10% pemimpin dunia adalah perempuan dan hanya 20,7% dari menteri pemerintahan yang merupakan perempuan (Inter-Parliamentary Union & UN Women, 2019). Selain itu tingkat representasi wanita dalam parlemen nasional secara bertahap meningkat selama dua dekade terakhir dari 11,8% pada tahun 1998 menjadi 17,8% pada tahun 2008 menjadi 23,5% pada tahun 2018. Beberapa kawasan mengalami peningkatan yang dramatis, seperti Afrika sub-Sahara, di mana dalam 20 tahun terakhir jumlah wanita di parlemen meningkat dari 11 menjadi 23,6% dan negara-negara Arab, yang mengalami kenaikan dari 3,1 hingga 17,5%. Akan tetapi representasi global secara keseluruhan masih jauh di bawah standar 30 persen yang sering diidentifikasi sebagai tingkat representasi yang diperlukan untuk mencapai "*critical mass*". (Pepera, 2018).

Di bidang ekonomi diskriminasi terhadap perempuan juga masih marak terjadi, bahkan di negara-negara besar dan maju. Pada tahun 2019, 53 negara tidak memiliki hukum yang melindungi wanita dari pelecehan seksual di tempat kerja. Kurangnya perlindungan hukum ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa negara memiliki hukum ketenagakerjaan yang diskriminatif yang membatasi partisipasi wanita dalam dunia kerja (The World Bank Group, 2019). Laporan Bank dunia 2018 mendapati bahwa 104 negara memiliki hukum yang mencegah wanita bekerja dalam pekerjaan tertentu. (The World Bank Group, 2018).

Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan terjadi baik di pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan informal seperti pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan dalam bisnis keluarga, lebih cenderung mendapati diri mereka dalam situasi yang rentan (International Labour Organization, 2018). Pada tahun 2018, itulah yang terjadi di lebih dari 90% negara-negara sub-Sahara Afrika, 89% dari negara-negara Asia Selatan, dan 75% dari negara-negara Amerika Latin (International Labour Organization, 2019). Di Asia bagian selatan dan Afrika sub-Sahara, 60% wanita

pekerja bekerja di bidang pertanian, di mana mereka sering berpartisipasi dalam kegiatan waktu dan padat tenaga kerja sementara menerima sedikit pembayaran (International Labour Organization, 2016).

Pada sektor pekerjaan formal, perempuan juga mendapatkan diskriminasi seperti stereotip jenis kelamin dan norma-norma budaya yang sering kali membatasi perempuan sehingga perempuan cenderung mendapatkan jabatan yang lebih rendah dan dibayar lebih rendah daripada yang ditawarkan kepada laki-laki (United Nations Population Fund, 2017). Pendapatan perempuan rata-rata 23% lebih kecil dari pendapatan pria, bahkan ketika kedua perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan yang sama (World Economic Forum, 2015). Kesenjangan ini juga meluas ke negara-negara maju, di mana perempuan kurang diwakili dalam beberapa bidang seperti pembelajaran dan pengenalan mesin, yang cenderung mendorong kemajuan masa depan dalam teknologi dan ekonomi yang lebih luas (Birajja, 2019).

Selain permasalahan ketidaksetaraan di bidang politik dan ekonomi, kekerasan berbasis gender atau Gender Based-Violence (GBV) masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kekerasan berbasis gender (GBV) adalah kekerasan yang ditujukan kepada seseorang yang didasarkan atas jenis kelamin, identitas gender, atau yang dianggap berpaut pada norma-norma kemaskulinan dan feminim yang dianut masyarakat. Hal itu mencakup penganiayaan fisik, seksual, dan psikologis seperti ancaman, pemaksaan, perampasan kebebasan, dan perampasan ekonomi (USAID, 2015).

GBV dan praktek-praktek yang berbahaya lainnya disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang digerakkan oleh banyak faktor, termasuk norma-norma sosial dan budaya, penerimaan sosial terhadap praktek yang berbahaya, dan kurangnya perlindungan hukum (Ramsey, 2019). GBV juga menghambat

partisipasi perempuan dalam masyarakat, yang kemudian memperpanjang ketimpangan. (Mukanangana, Moyo, Zvoushe, & Rusinga, 2014)

Secara global, 58% dari semua pembunuhan terhadap wanita dilakukan oleh pasangan atau anggota keluarga. Ini berarti 137 wanita di seluruh dunia dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri setiap hari. Lebih dari sepertiga wanita yang sengaja dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangan mereka (UNODC, 2018). Secara global, diperkirakan bahwa 35% wanita telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh seseorang yang bukan pasangan mereka. Sementara GBV melukai telah anak perempuan, wanita, dan minoritas seksual terlebih dahulu, GBV juga memiliki efek berantai terhadap keluarga dan masyarakat, secara sosial dan ekonomi. Di beberapa negara, seperti Bangladesh dan Vietnam, biaya ekonomi kekerasan oleh pasangan intim jauh melebihi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dasar (Duvvry, Callan, Carney, & Raghavendra., 2013). Banyak perjanjian internasional yang mendukung hak perempuan untuk hidup bebas dari GBV dan praktek-praktek yang berbahaya, tetapi tingkat kekerasan dan praktek yang berbahaya tetap sangat tinggi (Ramsey, 2019).

Negara-negara di dunia tentunya sedang berjuang untuk terus memerangi ketidaksetaraan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa negara adalah dengan mempromosikan terhadap kesetaraan gender. Upaya untuk melakukan promosi terhadap kesetaraan gender bertujuan untuk meningkatkan kesadaran baik masyarakat maupun pemerintah akan pentingnya kesetaraan gender. Misalnya saja di bidang politik. Suara dan partisipasi perempuan merupakan isu yang harus ditangani oleh pemerintah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam merumuskan aturan dan kebijakan. Penyesuaian representasi yang tidak adil selama ini akan sangat membantu untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender global. Tanpa representasi suara wanita dalam

pembuatan kebijakan dan lembaga, keputusan sering kali lebih menguntungkan bagi pria dan karena itu tidak efisien bagi bangsa secara keseluruhan (Kamrany & Robinson, 2012).

Selain itu kesadaran masyarakat dan pemerintah baik nasional maupun internasional akan pentingnya kesetaraan gender dapat memacu pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan. Seperti diskriminasi terhadap perempuan, anak perempuan maupun kelompok minoritas, mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender, menciptakan kesetaraan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, serta pemenuhan atas hak asasi manusia yang dapat dinikmati oleh seluruh orang di dunia.

Salah satu negara yang sangat gencar dalam mempromosikan kesetaraan gender adalah Swedia. Swedia dikenal sebagai negara feminis pertama di dunia. Swedia adalah negara Skandinavia dengan populasi sekitar 9,5 juta. Ibu kota Swedia adalah Stockholm. Menurut data dari World Bank tahun 2014 Swedia merupakan salah satu negara maju dengan tingkat pengangguran yang sangat rendah di dunia yaitu sebesar 5,52% dan perekonomiannya sangat kuat. Selain itu, angka harapan hidup di negara ini juga sangat tinggi, mencapai 80 tahun untuk pria dan 84 tahun untuk wanita (BBC, 2018).

Swedia telah lama menghargai nilai kesetaraan gender, bahkan puluhan tahun lalu, sebelum banyak negara mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender. Sejak awal tahun 70-an, kesetaraan gender telah diakui sebagai area kebijakan terpisah di Swedia. Sejak itu Swedia telah menunjukkan hasil yang jelas dalam hal tingkat pekerjaan dan pertumbuhan yang tinggi. Perkembangan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kemajuan ini muncul sebagai hasil dari dialog politik, kerja keras dari masyarakat sipil yang kuat dan gerakan perempuan. Terlepas dari sejumlah prestasi penting yang dicapai terhadap kesetaraan gender, tantangan tetap ada dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk pemerintahan feminis. (Ministry of Employment, 2019)

Pemerintah Swedia berkomitmen untuk terus meningkatkan tingkat kesetaraan gender di negaranya dengan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan sama di semua lapisan masyarakat. Pemerintah Swedia bahkan memiliki pasal mengenai kesetaraan gender sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan gender. yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 13 dalam konstitusi Swedia, sebagai berikut:

*“The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, color, national or ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age or other circumstance affecting the individual.”* (Pasal 1 ayat 2)

*“No act of law or other provision may imply the unfavorable treatment of anyone on grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties.”* (Pasal 2 ayat 13)

Terlihat jelas dari pasal sebelumnya bahwa Konstitusi Swedia sendiri tidak menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat partisipasi tertentu dalam pemilihan umum dan bidang akademik. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah organisasi perempuan dan isu partisipasi perempuan di ruang publik, proporsi partisipasi perempuan Swedia dalam politik secara bertahap meningkat. Meskipun pada tahun 1971, jumlah perempuan di parlemen masih 14%, namun sejak pemilihan umum 1994, proporsi keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai 40%. Sejak itu, proporsi perempuan tidak pernah turun di bawah 40 secara keseluruhan. Perempuan menyumbang 41% dari parlemen pada tahun 1994, 43% pada tahun 1998, 45% pada tahun 2002, 47,3% pada tahun 2006, 45% pada tahun 2010, dan 44% pada tahun 2014. Angka tertinggi tercatat pada pemilu 2006, di mana mencapai 47,3% perempuan yang terpilih untuk kursi parlemen (Lenita, 2014).

Selain itu menurut *Gender Equality Index 2019*, Swedia menempati peringkat pertama di Uni Eropa dalam hal kesetaraan gender dengan nilai 86,3 dari 100 poin. Skor tertinggi Swedia terdapat dalam domain kesehatan (94,7 poin) dan waktu (90,1 poin). Ketidaksetaraan gender paling menonjol dalam domain pengetahuan (73,8 poin). Antara 2005 dan 2017, skornya meningkat di semua domain. Peningkatan terbesar ada di domain daya (+ 9,3 poin) dan pengetahuan (+ 5,7 poin). Kemajuan Swedia paling lambat dalam domain waktu (+ 0,5 poin) dan uang (+ 2,7 poin). Selama tahun 2005-2017 *Gender Equality Index* Swedia terus meningkat bahkan lebih tinggi dibanding indeks Uni Eropa yang mana hal ini menjadikan Swedia menjadi salah satu role model dalam hal kesetaraan gender (EIGE, 2019)

Pada tahun 2014, dibawah pemerintahan baru yaitu Partai Sosial Demokrat, Swedia mendeklarasikan dirinya sebagai negara feminis pertama di dunia. Stefan Löfvén mengumumkan pada 3 Oktober 2014 bahwa pemerintah akan menangani kesetaraan gender di sektor industri dan menyetujui kuota gender di lapangan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dunia kerja (Lenita, 2014). Kuota yang diumumkan adalah antara 40-60% wanita yang berpartisipasi dalam perusahaan.

Margot Wallstorm, yang mengambil alih masa jabatan baru pada 2014, terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Swedia. Sejak Wallstorm terpilih sebagai Menteri Luar Negeri baru pada Oktober 2014, ia telah meluncurkan Kebijakan Luar Negeri Feminis untuk pertama kalinya di dunia (Ministry for Foreign Affair, 2014). Maksudnya bahwa kesetaraan gender adalah pusat prioritas pemerintah dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Swedia memastikan bahwa perspektif kesetaraan gender dibawa ke dalam pembuatan kebijakan secara luas, baik secara nasional maupun internasional. Wanita dan pria harus memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. Ini adalah hak manusia dan masalah demokrasi dan keadilan (Government Office of Sweden, 2015).

Semenjak itu, Swedia telah mengambil langkah radikal untuk mencapai kesetaraan gender. Pada pemerintahan sebelumnya, meskipun Swedia telah lama memperhatikan kesetaraan gender, baru pada pemerintahan Wallstrom akhirnya Swedia benar-benar mengambil langkah tegas untuk mencapai kesetaraan gender di dunia. Hal ini karena Swedia percaya bahwa meskipun hak-hak perempuan telah sangat ditingkatkan, nyatanya banyak perempuan masih menghadapi diskriminasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemerintah Swedia melalui Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa perspektif gender harus dimasukkan ke dalam semua bidang kebijakan luar negeri Swedia (Ministry for Foreign Affair, 2014). Selain itu, Swedia juga berharap melalui kebijakan luar negeri feminis ini, Swedia mampu untuk mempromosikan isu mengenai kesetaraan gender agar menjadi isu yang bisa dibahas lebih serius agar terciptanya kesetaraan gender dan perwujudan penuh hak asasi semua perempuan dan laki-laki di seluruh dunia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: **Apa Upaya Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2019?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Objektif**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai upaya Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2019.



### **1.3.2 Tujuan Subjektif**

1. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan faedah bagi peneliti sendiri dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan internasional.
2. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwijaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi bagi penstudi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia dalam menciptakan kesetaraan gender baik dalam tingkat nasional maupun internasional

Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender dan kebijakan luar negeri feminis Swedia.

Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengevaluasi, memperbaiki permasalahan kesetaraan gender di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alifvioni, A. (2018). *Implementasi Politik Luar Negeri Feminis Swedia tahun 2014-2017*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BBC. (2018, October 01). *Sweden Country Profile*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-17955808>
- BBC. (2021, Desember 01). *Sweden country profile*. Dipetik Mei 30, 2022, dari BBC: <https://www.bbc.com/news/world-europe-17955808>
- Bigio, J., & Vogelstein, R. (2020). *Understanding Gender Equality in Foreign Policy: What the United States Can Do*. Council on Foreign Relations. Retrieved from [https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report\\_pdf/discussion-paper\\_bigio-and-vogelstein\\_gender-equality\\_or\\_0.pdf](https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/discussion-paper_bigio-and-vogelstein_gender-equality_or_0.pdf)
- Birajja, M. (2019). *Making Women Workers Count: A Framework for Conducting Gender-Responsive Due Diligence in Supply Chains*. BSR.
- Bohman, N. (Ed.). (1944). *Swedish Men and Women*. Stockholm: Bonnier.
- CFFP. (2021). *Feminist Foreign Policy*. Retrieved from CFFP: <https://centreforfeministforeignpolicy.org/feminist-foreign-policy>
- Connected Women. (2015). *Bridging the gender gap: Mobile access and usage in low and middle-income countries*. GSMA. Retrieved from <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf>
- Cristensson, J. (2007). *Swedish History by Signum: The Gustavian Age*. Stockholm: Bokförlaget Signum.
- Duvvry, N., Callan, A., Carney, P., & Raghavendra., S. (2013). *Intimate Partner Violence: Economic Costs and Implications for Growth and Development*. The World Bank.
- EIGE. (2019). *Gender Equality Index 2019: Sweden*. Lithuania: European Institute for Gender Equality.
- Ekberg, J., Eriksson, R., & Friebel, G. (2013). Parental leave — A policy evaluation of the Swedish “Daddy-Month” reform. *Journal of Public Economics*, 131-143. doi:10.1016/j.jpubeco.2012.09.001
- European Commission. (2016). *Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019*. Luxemburg: European Union. Retrieved from [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic\\_engagement\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strategic_engagement_en.pdf)

- European Women's Lobby. (2018, November 06). *The Swedish Women's Lobby*. Dipetik Juni 02, 2022, dari European Women's Lobby: <https://www.womenlobby.org/The-Swedish-Women-s-Lobby>
- Government Office of Sweden. (2015, November). *A Feminist Government*. Retrieved from Government Office of Sweden: <https://www.government.se/government-policy/a-feminist-government/>
- Government Office of Sweden. (2018, Maret 14). *Examples of what Sweden's feminist foreign policy has contributed to*. Dipetik Juni 11, 2022, dari Government Office of Sweden: <https://www.government.se/articles/2018/03/examples-of-what-swedens-feminist-foreign-policy-has-contributed-to/>
- Hicks, J. (2021). *Feminist Foreign Policy: Contributions and Lessons*. K4D. Retrieved from [https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16840/1037\\_Feminist\\_Foreign\\_Policy\\_Contributions\\_and\\_lessons.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/16840/1037_Feminist_Foreign_Policy_Contributions_and_lessons.pdf?sequence=4&isAllowed=y)
- ICJR. (2011, Oktober 4). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Diambil kembali dari Institute For Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia/>
- Ikenberry, G. J. (2014, Mei 01). *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*. Diambil kembali dari Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics>
- International Labour Organization. (2016). *Women at Work: Trends 2016*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2018). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture 3rd Edition*. Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2019). *A Quantum Leap for Gender Equality: For a better future of work for all*. Geneva: International Labour Organization.
- Inter-Parliamentary Union & UN Women. (2019). *Women in Politics: 2019*. Retrieved from Inter-Parliamentary Union: <https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2019-03/women-in-politics-2019>
- Kamrany, N. M., & Robinson, C. (2012, Juni 11). *The Global Problem of Gender Inequality*. Retrieved from Huffpost: [https://www.huffpost.com/entry/gender-inequality\\_b\\_1417535](https://www.huffpost.com/entry/gender-inequality_b_1417535)

- Lenita, F. (2014). Fact Sheet on Sweden. *Legal Struggles and Political Mobilization around Gender Quotas in Europe*, (p. 7). Florance.
- Lin, L., & Hongtao, L. (2017). Joseph Nye's Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological Political Education. *Humanities and Social Sciences*, 69-71.
- Lofven, S. (2019). *Government Communication 2019/20:17*. Stockholm: The Government of Sweden.
- Löfven, S. (2019). *Sweden's Feminist Foreign Policy*. Stockholm: Government Communication of Sweden.
- Manik, J. Y. (2020). Diplomasi Digital Midwives4all Sebagai Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia di Uganda. *Journal of International Relations*, 6, 498-509.
- Ministry for Foreign Affairs. (2014, October). *Sweden is the first country to pursue a feminist*. Retrieved from Ministry for Foreign Affairs: <http://www.swemfa.se/feminist-foreign-policy/>
- Ministry for Foreign Affairs. (2017). *Sweden's feminist foreign policy: Example from three years of implementation*. Stockholm: Government Offices of Sweden.
- Ministry for Foreign Affairs of Sweden. (2019). *Sweden's Feminist Foreign Policy*. Government Office of Sweden, Ministry for Foreign Affairs. Stockholm: Ministry for Foreign Affairs.
- Ministry of Employment. (2019). *Gender Equality Policy in Sweden: A feminist Government*. Ministry of Employment. Stockholm: Government Office of Sweden. Retrieved from <https://www.government.se/49c604/contentassets/efcc5a15ef154522a872d8e46ad69148/gender-equality-policy-in-sweden-210608-ny.pdf>
- Mukanangana, F., Moyo, S., Zvoushe, A., & Rusinga, O. (2014, Maret). Gender Based Violence and its Effects on Women's Reproductive Health: The Case of Hatcliffe, Harare, Zimbabwe. *African Journal of Reproductive Health*, 110-112.
- O'Reilly, M., Súilleabháin, A. Ó., & Paffenholz, T. (2015). Women's Participation and a Better Understanding of the Political. In U. Women, *Preventing Conflict Transforming Justice Securing the Peace* (p. 45). Washington: UN Women.
- OHCHR. (2015). *UN Treaty Data Base*. Dipetik Agustus 16, 2022, dari United Nations Human Rights Treaty Bodies: [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=168&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=168&Lang=en)

- Pepera, S. (2018, Februari 28). *Why Women in Politics?* Diambil kembali dari Women Deliver: <https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/>
- Ramsey, M. (2019, Oktober). *Dramatically Reduce Gender-Based Violence and Harmful Practice*. Retrieved from Women Deliver: [https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-5-D4G\\_Brief\\_GBV.pdf](https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2019/11/2019-5-D4G_Brief_GBV.pdf)
- Reader, K. (2012, November 28). *Feminism today: the fight has changed, the stereotypes remain, and the cause will never die*. Retrieved from Independent: <https://www.google.co.id/amp/s/www.independent.co.uk/voices/comment/feminism-today-the-fight-has-changed-the-stereotypes-remain-and-the-cause-will-never-die-8364343.html%3famp>
- Rodriguez, L. (2021, Oktober 22). *What Is SRHR? Everything to Know About Sexual and Reproductive Health and Rights*. Dipetik Juni 06, 2022, dari Global Citizen: <https://www.globalcitizen.org/en/content/sexual-reproductive-health-rights-srhr-explained/>
- Shenoy, S. (2022, Februari 07). *Gender equality in Sweden: How modern gender roles in Sweden make it one of the best countries for women to live in*. Dipetik Juni 03, 2022, dari Scandification: <https://scandification.com/gender-equality-in-sweden-gender-roles-in-sweden/>
- Sweden Institute. (2021, Juni 1). *Key Fact About Swenden*. Dipetik Mei 30, 2022, dari Sweden Sverige: <https://sweden.se/life/society/key-facts-about-sweden>
- Sweden Institute. (2022, Februari 15). *Gender Equality; Equal power and influence for women and men – that's what Sweden is aiming for*. Dipetik Juni 03, 2022, dari Sweden Sverige: <https://sweden.se/life/equality/gender-equality>
- Swedish Gender Equality Agency. (2018, Januari 02). *About Swedish Gender Equality Agency*. Dipetik Juni 03, 2022, dari Swedish Gender Equality Agency: <https://swedishgenderequalityagency.se/about-the-swedish-gender-equality-agency/>
- Tempo.co. (2021, November 25). *Profil Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson*. Dipetik Mei 30, 2022, dari Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1532594/profil-perdana-menteri-swedia-magdalena-andersson/full&view=ok>
- The Swedish Women's Lobby. (2016). *Living Up to CEDAW-What Does Sweden Need to Do?* Stockholm: The Swedish Women's Lobby.
- The World Bank. (2018). *Women, Business and the Law 2018*. Washington: The World Bank.

- The World Bank Group. (2018). *Women, Business and the Law 2018: A Decade of Reform*. Washington DC: The World Bank. Retrieved from <https://wbl.worldbank.org/en/reports>
- The World Bank Group. (2019). *Women, Business and the Law 2019: A Decade of Reform*. Washington DC: The World Bank. Retrieved from <http://wbl.worldbank.org/>
- UN Women. (2015). *Progress of the World's Women Report 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights*. New York: UN Women.
- UN Women. (2015). *Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges*. New York: UN Women.
- UN Women. (2019). *Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2019*. the United Nations Department of Economic and Social Affairs. New York: UN Women.
- UNFPA. (2017, Oktober 25). *Rapariga Biz sets girls on a more prosperous and healthy path in Mozambique*. Dipetik Juni 05, 2022, dari UNFPA East and Southern Africa: <https://esaro.unfpa.org/en/news/rapariga-biz-sets-girls-more-prosperous-and-healthy-path-mozambique>
- UNFPA. (2019, Juli 31). *Female Genital Mutilation*. Retrieved from United Nation Population Fund: <https://www.unfpa.org/female-genital-mutilation#readmore-expand>
- UNFPA. (2020). *Sweden*. Dipetik Juni 07, 2022, dari United Nations Population Fund: <https://www.unfpa.org/donor/sweden-0>
- United Nations Population Fund. (2017). *The State of World Population 2017. World's Apart: Reproductive Health and Rights in the Age of Inequality*. New York: United Nations Population Fund.
- UNODC. (2018). *Global Study on Homicide: Gender-related killing of women and girls*. Vienna: United Nations Office of Drugs and Crime. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18\\_Gender-related\\_killing\\_of\\_women\\_and\\_girls.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf)
- USAID. (2015). *Strategy to Prevent and Respond to Gender-Based Violence Globally*. Retrieved from USAID: [https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2155/GBV\\_Factsheet.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2155/GBV_Factsheet.pdf)



- USAID. (2016, Juni 09). *Strengthening Women's Rights and Political Participation*. Retrieved from USAID: <https://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/addressing-gender-programming/strengthening-womens>
- Villa, M. (2017, Januari 11). *Women own less than 20% of the world's land. It's time to give them equal property rights*. Dipetik Juni 03, 2022, dari World Economic Forum: <https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-them-equal-property-rights>
- Wani, Z. A. (2018). Gender inequality – A Global issue. *International Journal of Research*, 384.
- World Economic Forum. (2015). *The Global Gender Gap Report 2015*. World Economic Forum. Retrieved from <http://www3.weforum.org/docs/GGGR2015/The%20Global%20Gender%20Gap%20Index%202015.pdf>